

TANTANGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA



Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah

- Program Sembako: 37,3 (2023)
- PKH: 33,7% (2023)
- PIP: 41,3% (2023)
- PBI: 53,8% (2023)
- Rata-rata: 41,5% (2023)

(Susenas, 2023)



Ancaman Bencana Alam

- Selama 2022, terdapat lebih dari 2 juta orang terdampak bencana dengan lebih dari 10 ribu rumah dan fasilitas umum yang rusak.
- 43% dari seluruh bencana yang terjadi di Indonesia merupakan banjir

(BNPB, 2023)



Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas

Tingkat Kemiskinan Penyandang disabilitas cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 13.81% jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional sebesar 9,36% pada tahun 2023.

(Susenas, 2023)



Pekerja Lansia

Sebanyak 53,93% lansia masih aktif bekerja.

(Sakernas BPS, Agustus 2023)



TPAK Perempuan Masih Rendah

TPAK Perempuan 60,18% sedangkan TPAK laki-laki 86,97% (2023). Partisipasi perempuan di pekerjaan formal lebih rendah lagi, yakni hanya sebesar 35,75% di tahun 2023.

(Sakernas BPS, 2023)



Rendahnya kepesertaan pekerja informal pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih bias pekerja formal. Pekerja Bukan Penerima Upah yang terlindungi baru sebesar 7,49% . (BP Jamsostek, Sakernas BPS, Mei 2023, diolah)
- Pemahaman program jaminan sosial dan kepatuhan peserta masih rendah
- Iuran dan Manfaat belum seimbang, sehingga mengancam keberlangsungan program



Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati

- Masih sekitar 12,4% instansi yang baru mengirimkan data balikan untuk pemanfaatan data kependudukan (Ditjen Dukcapil, Oktober 2023)
- Perencanaan pembangunan masih belum menggunakan data adminduk sebagai basis data.

TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MENDORONG PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

TRANSFORMASI INDONESIA

Transformasi Sosial

Transformasi Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

UU No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

IE1 **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

IE2 Kesehatan untuk Semua

IE3 Pendidikan Berkualitas yang Merata



Transformasi sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan **cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan**, jamsos, dan kesempatan kerja/berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana/dengan bencana.

Pilar Perlindungan Sosial Adaptif

1

Kelembagaan dan kemitraan

Hubungan kelembagaan dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait ASP (baik pemerintah maupun nonpemerintah).

2

Modifikasi Program

Pengembangan sistem database termutakhirkan dan interoperabilitas/berbagi pakai untuk implementasi ASP.

3

Data dan Informasi

Perluasan, penyesuaian, dan konvergensi program ASP untuk memperkuat kapasitas adaptif, antisipatif, dan absortif.

4

Pembiayaan yang Adaptif dan Berkelanjutan

Perencanaan anggaran perlindungan sosial yang tepat.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

STRATEGI

1. Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi
2. Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun.
3. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja
5. Penyelarasan peraturan perlindungan sosial.
6. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
7. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan
9. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
10. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat & memperluas cakupan integrasi perlintsos yang berkesinambungan utamanya *social impact bonds*, *social impact investment*, dan optimalisasi dana jamsos.

ARAH KEBIJAKAN

Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan, jamsos, dan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana.

Untuk Semua Penduduk

- Sesuai siklus hidup
- Seluruh wilayah
- Sesuai kerentanan dan kondisi kesejahteraan

Pada Semua Layanan

- Pengurangan beban pengeluaran
- Perlindungan berdasarkan kontribusi
- Manfaat tunai dan non tunai (Pemberdayaan dan pelatihan)

Oleh Semua Masyarakat

- Partisipasi swasta & masyarakat
- Partisipasi multi sektoral
- Partisipasi pusat-daerah

Perlindungan Sosial yang Adaptif

“Setiap penduduk mendapatkan perlindungan sosial sepanjang siklus hidup yang menghindarkan dari kemiskinan dan mempertahankan kehidupan yang layak”

TARGET 2045

Tingkat Kemiskinan
0,5 – 0,8 %

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
99,5 %

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
60 %

AGENDA PEMBANGUNAN IE PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

AGENDA PEMBANGUNAN : TRANSFORMASI SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk

1

Satu Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi

2

Integrasi Bantuan Sosial,
Jaminan Sosial, dan
Pemberdayaan
Masyarakat yang Adaptif

3

Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN)

4

Pengembangan Ekonomi
Perawatan (*care
economy*) untuk
Perluasan perlindungan
sosial dan Kesejahteraan

5

Inklusi sosial untuk
Kesejahteraan
Penyandang Disabilitas,
Lanjut Usia, dan
Kelompok Rentan
Lainnya

Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang berbasis data, mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perawatan bagi seluruh kelompok rentan di situasi bencana maupun situasi normal.

URGENSI PELAKSANAAN SEMINAR PERLINDUNGAN SOSIAL INDONESIA

Strategi menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Tangguh, dan Produktif



Membagikan wawasan terkait tantangan dalam perlindungan sosial untuk memperkuat ketahanan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.



Mengumpulkan pakar dan praktisi untuk mendiskusikan inovasi dan solusi baru dalam mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia.



Mengumpulkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penetapan kebijakan perlindungan sosial ke depan.

TERIMA KASIH



*Kementerian PPN/
Bappenas*



WORLD BANK GROUP

SUPPORTED BY:



Australian Government

